

INTEGRITY
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

STRATEGI MENYUSUN DOKUMEN DAN ALAT BUKTI DALAM SENGKETA TUN

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Tata Negara,
Senior Partner INTEGRITY Law Firm,
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia.

Jakarta, 23 Januari 2026

AGENDA WEBINAR INTEGRITY SHARING

Agenda webinar INTEGRITY Sharing ini diadakan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun kedepan. Waktu pelaksanaannya 2 (dua) Minggu setelah webinar Australia, INTEGRITY Lawyers, diadakan.

1. Menjadi Advokat yang Cuan dan Cendekiawan
2. Menjadi Lawyer Hebat: Mengasah Keahlian Menulis
3. Seni Berbicara Meyakinkan: Skill Wajib Lawyer Hebat
4. Menjadi Lawyer Handal: Mengasah Kemampuan Bernegosiasi
5. Teknik & Strategi Penyusunan Dokumen: Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi
6. Strategi Menyusun Dokumen dan Alat Bukti dalam Sengketa TUN

AGENDA WEBINAR INTEGRITY SHARING

Agenda webinar INTEGRITY Sharing ini diadakan rutin setiap 1 (satu) bulan sekali selama 1 (satu) tahun kedepan. Waktu pelaksanaannya 2 (dua) Minggu setelah webinar Australia, INTEGRITY Lawyers, diadakan.



Tips & Trik Mencari Klien

7



Membuat Perjanjian-Perjanjian Hukum

8



Teknik dan Strategi Melakukan Legal Audit

9



Teknik dan Strategi Penyusunan Legal Opinion

10



Kiat Sukses Membangun Law Firm Bereputasi

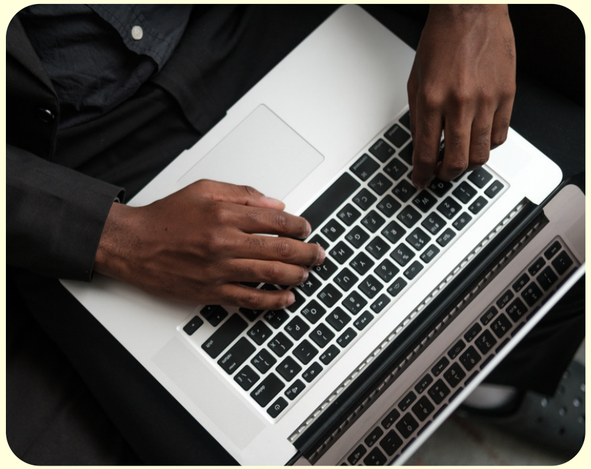
11



Meniti Karir Hukum dan Menjadi Lawyer di Australia

12

ALUR PEMBAHASAN



www.integritylawfirms.com

1. GAMBARAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
2. OBJEK DAN SUBJEK TUN
3. PENYUSUNAN GUGATAN DAN PEMBUKTIAN



1

GAMBARAN UMUM PTUN

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

integrity@integritylawfirms.com

SENGKETA TATA USAHA NEGARA



Pasal 1 Ayat 4 UU 5/1986

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku”

RAGAM SENGKETA TUN



1 **Sengketa TUN:**
UU 5/1986

2 **Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD):**
PERMA 2/2019

3 **Sengketa Keterbukaan Informasi:**
UU 14/2008

4 **Sengketa PTBPUKU:**
UU 2/2012

5 **Sengketa Pemilu/kada:**
PERMA 4&5 2017

6 **Sengketa Pengadaan:**
Perpres 16/2018



2

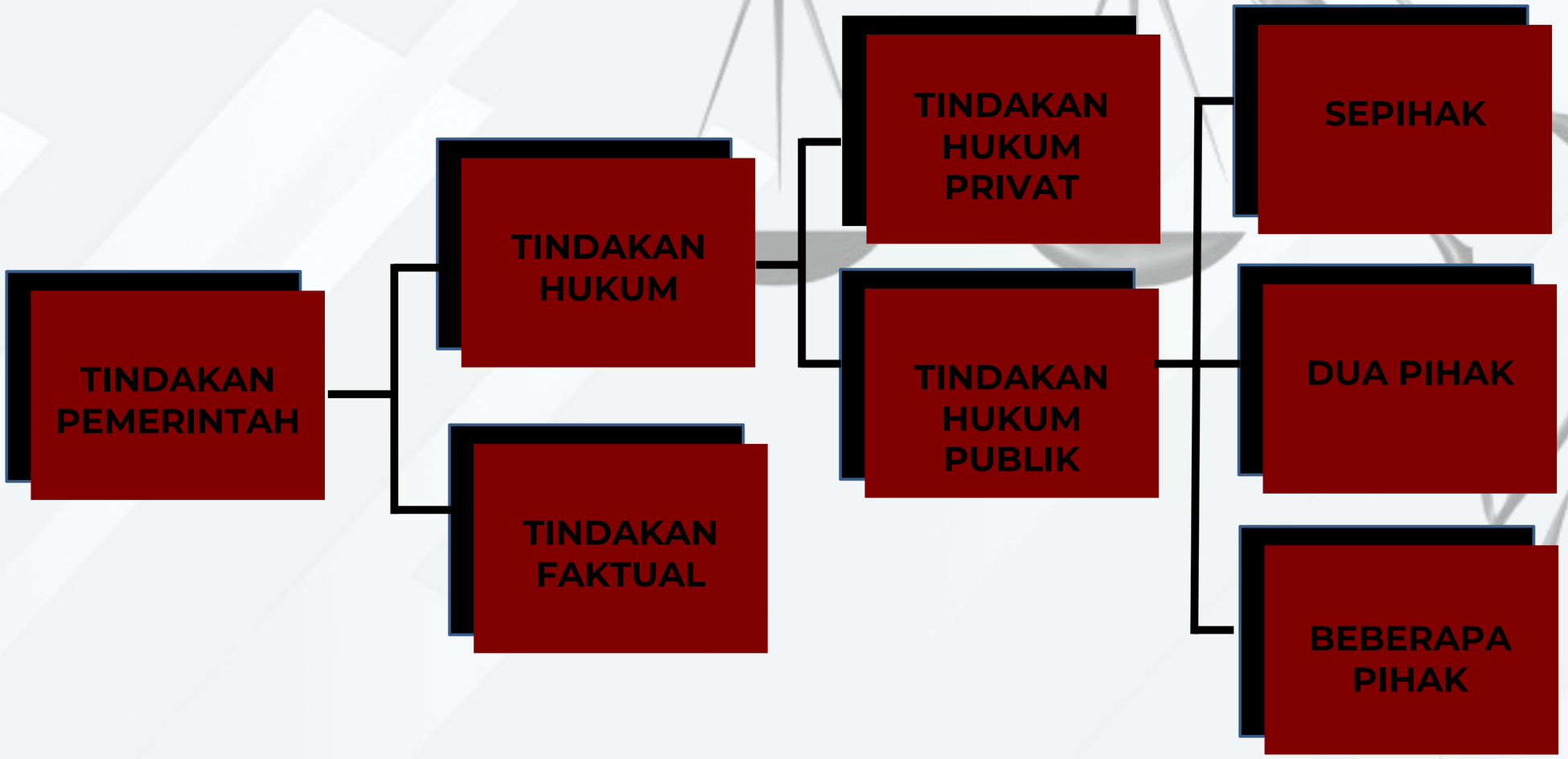
OBJEK DAN SUBJEK TUN

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

integrity@integritylawfirms.com

OBJEK TUN



integrity@integritylawfirms.com

PERLUASAN OBJEK TUN DALAM UU AP

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara **di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya**;
c. berdasarkan ketentuan **perundang-undangan dan AUPB**;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang **berpotensi menimbulkan akibat hukum**; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

integrity@integritylawfirms.com

OBJEK SENGKETA TUN BERDASARKAN SEMA 4/2016

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara **di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya**;
c. berdasarkan ketentuan **perundang-undangan dan AUPB**;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang **berpotensi menimbulkan akibat hukum**; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

integrity@integritylawfirms.com

OBJEK SENGKETA TUN BERDASARKAN SEMA 4/2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Desember 2016

Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016

Kepada Yth,
1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di –
Seluruh Indonesia

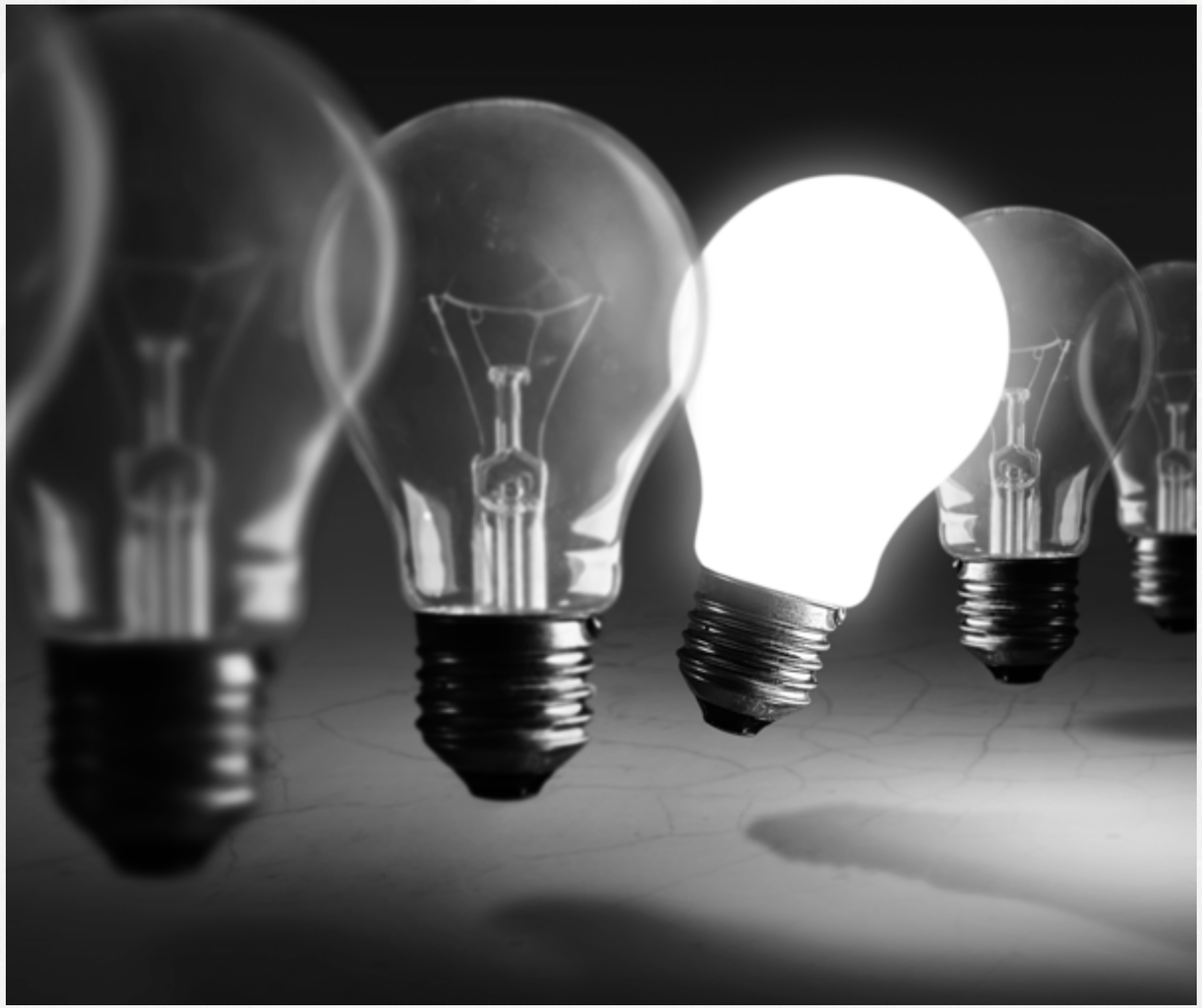
SURAT EDARAN
Nomor 4 Tahun 2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

3. Objek Gugatan/Permohonan
   a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:
      1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
      2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
      3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
      4) Bersifat:
         - Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).
         - Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
         - Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).
      5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
      6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

KTUN YANG DIKECUALIKAN



Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986

1. KTUN Perbuatan hukum perdata;
2. KTUN Pengaturan yang bersifat umum;
3. KTUN masih memerlukan persetujuan;
4. KTUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau PUU pidana lain;
5. KTUN hasil pemeriksaan badan peradilan;
6. KTUN mengenai TNI;
7. KTUN mengenai hasil pemilu;
8. KTUN dalam keadaan perang;
9. KTUN dalam keadaan darurat;
10. KTUN tentang *fit and proper test.*

integrity@integritylawfirms.com



KTUN MENGACU PADA ISI, BUKAN BENTUK

Maksud dari penetapan tertulis, **mengacu pada isi**, bukan bentuk. Sebuah memo atau nota dinas dapat memenuhi syarat KTUN apabila sudah jelas:

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

integrity@integritylawfirms.com

SYARAT SAH KEPUTUSAN

1. Sesuai dengan peraturan p**erundang-undangan:**
   - Ditetapkan oleh pejabat yang **berwenang**;
   - Dibuat sesuai **prosedur;**
   - **Substansi** yang sesuai dengan objek Keputusan;
2. Sesuai dengan **AUPB**.

KUMULATIF

Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan





ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. ketidakberpihakan;
d. kecermatan;
e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
h. pelayanan yang baik.

Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

integrity@integritylawfirms.com

KEPUTUSAN TIDAK SAH ATAU BATAL

TIDAK SAH

Dibuat oleh Badan/Pejabat yang:

- Tidak berwenang.
- Melampaui wewenang.
- Sewenang-wenang.

BATAL

Terdapat kesalahan:

- prosedur.
- substansi.



integrity@integritylawfirms.com

Akibat Hukum Tidak Sah atau Batal

EX-TUNC

- tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan
- segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

EX-NUNC

- tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan; dan
- berakhir setelah ada pembatalan.

PERIHAL *LEGAL STANDING*

PASAL 53 UU PTUN

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

1.Kepentingan Hukum:

- Hubungan langsung; atau
- Hubungan tidak langsung.

2. Kerugian

- Kerugian Aktual; atau
- Kerugian Potensial.

integrity@integritylawfirms.com



3

PENYUSUNAN GUGATAN DAN PEMBUKTIAN

www.integritylawfirms.com

825, Citylofst Sudirman

PAHAMI TENGGANG WAKTU

Pasal 55 UU PTUN:

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

SEMA 1/1991:

*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atas Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis **sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara** dan **mengetahui adanya keputusan tersebut.***

SEMA 3/2015:

*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atas Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung sejak yang bersangkutan **pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya**.*

UPAYA ADMINISTRATIF

UPAYA ADMINISTRATIF		
No	Keterangan	Batas Waktu
1	Mengajukan Keberatan	21 Hari Kerja Sejak SK Diumumkan
2	Termohon Menyelesaikan Keberatan	10 Hari Kerja
3	Termohon Menetapkan SK Hasil Penyelesaian Keberatan	5 Hari Kerja
4	Pemohon Mengajukan Banding	10 Hari Kerja Sejak Keputusan diterima
5	Atasan Termohon Menyelesaikan Banding	10 Hari Kerja
6	Atasan Termohon Menetapkan SK Hasil Penyelesaian Banding	5 Hari Kerja
7	Mengajukan Gugatan ke PTUN	90 Hari Kalender

integrity@integritylawfirms.com

DASAR HUKUM TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DI PTUN KAITANNYA DENGAN UPAYA ADM

PASAL 55 UU PERATUN

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu ***sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara***.

PASAL 5 AYAT (1) *JUNCTO* PASAL 1 ANGKA 9 PERMA 6/2018

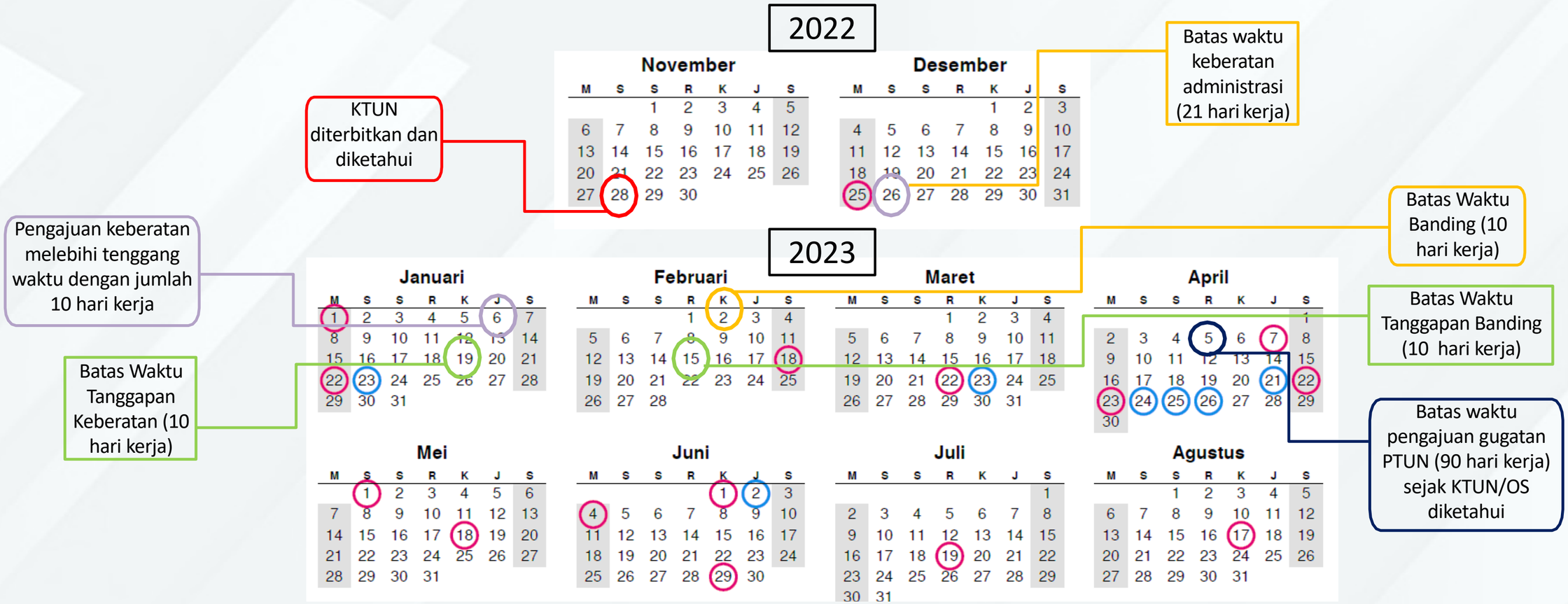
Pasal 5 ayat (1)
Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Pasal 1 Angka 9
Hari adalah ***hari kerja.***

HALAMAN 10 ANGKA 1 HURUF A SEMA 5/2021

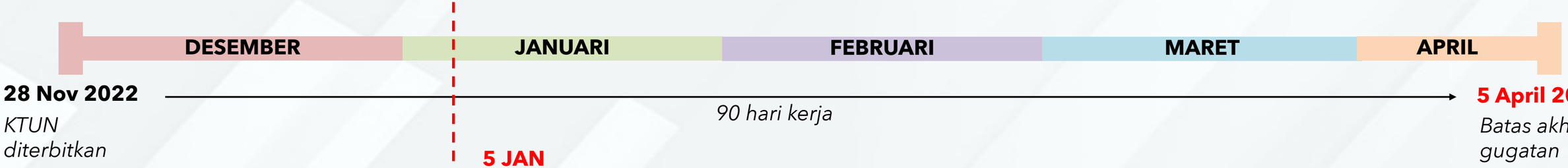
Upaya administratif berdasarkan Perma 6/2018 yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, ***tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.***

CONTOH TIME FRAME I



CONTOH TIME FRAME II

1. KTUN I



2. KTUN II



Strategi:

***Timeframe* digunakan dalam penanganan perkara 2 KTUN atau lebih dalam 1 gugatan.**

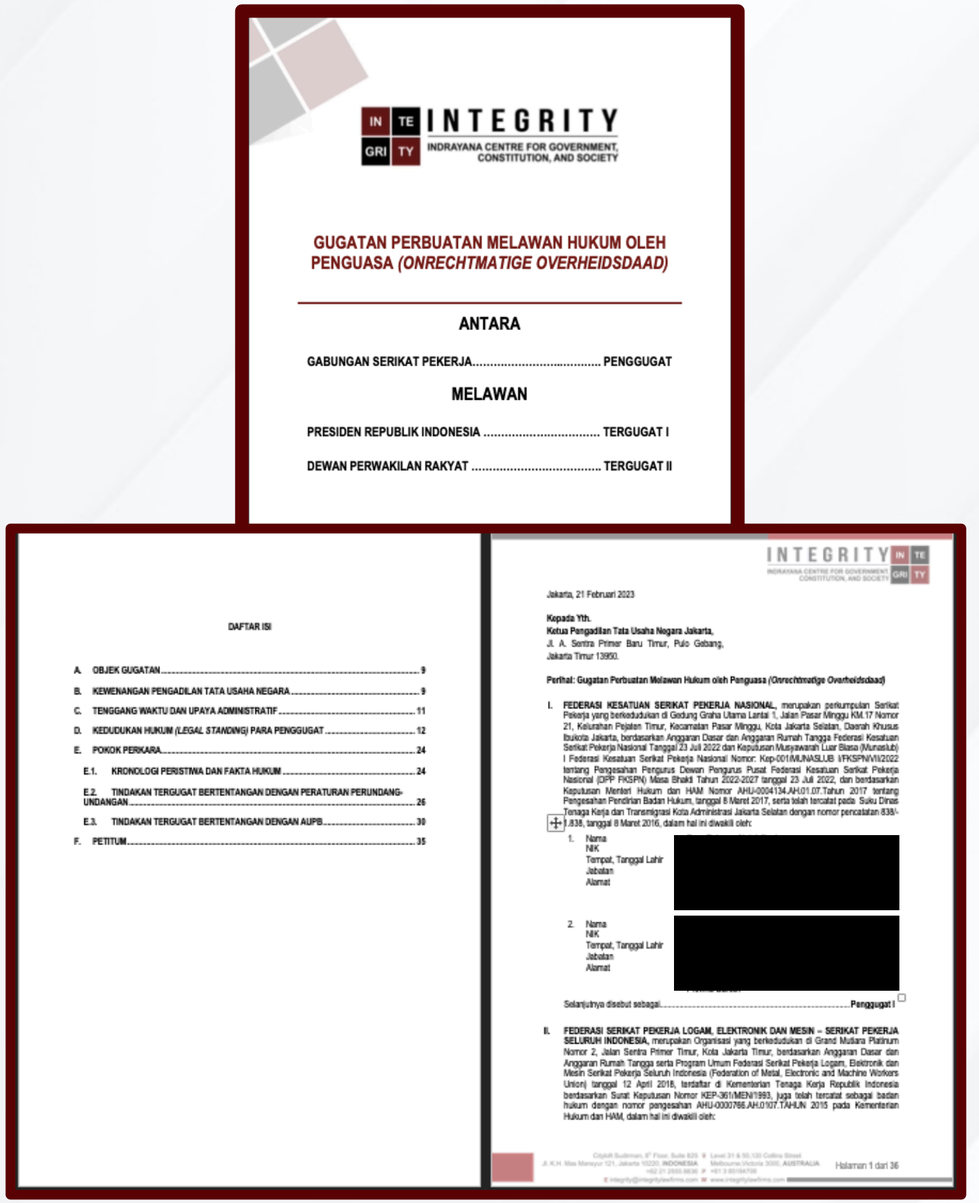
integrity@integritylawfirms.com

SUSUNAN GUGATAN TUN

PEMBUKA;

A. OBJEK GUGATAN;
B. KEWENANGAN PENGADILAN;
C. TENGGANG WAKTU;
D. KEPENTINGAN HUKUM;
E. POKOK PERKARA;
F. KERUGIAN PENGGUGAT (JIKA ADA);
G. PENUNDAAN (JIKA ADA);
H. PETITUM;

PENUTUP.



INTEGRITY
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA *(ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)*

ANTARA

GABUNGAN SERIKAT PEKERJA..... PENGGUGAT

MELAWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ..... TERGUGAT I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ..... TERGUGAT II

DAFTAR ISI

A. OBJEK GUGATAN 9
B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 9
C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF 11
D. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PARA PENGGUGAT 12
E. POKOK PERKARA 24
E.1. KRONOLOGI PERISTIWA DAN FAKTA HUKUM 24
E.2. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 26
E.3. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN AUPB 30
F. PETITUM 35

INTEGRITY
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

Jakarta, 21 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang,
Jakarta Timur 13950.

Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa *(Onrechtmatige Overheidsdaad)*

I. **FEDERASI KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL**, merupakan perkumpulan Serikat Pekerja yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 dan Keputusan Munyawarah Luar Biasa (MunasLub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022, dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0004134.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Badan Hukum, tanggal 8 Maret 2017, serta telah tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan nomor pencatatan 838/-1.838, tanggal 8 Maret 2016, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama
   NIK
   Tempat, Tanggal Lahir
   Jabatan
   Alamat
2. Nama
   NIK
   Tempat, Tanggal Lahir
   Jabatan
   Alamat

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat I**

II. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, merupakan Organisasi yang berkedudukan di Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Federation of Metal, Electronic and Machine Workers Union) tanggal 12 April 2018, tersdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-361/MEN/1999, juga telah tercatat sebagai badan hukum dengan nomor pengesahan AHU-0300766.AH.0107.TAHUN 2015 pada Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini diwakili oleh:

Halaman 1 dari 36

ALASAN GUGATAN

1. KTUN melanggar aspek **kewenangan**
2. KTUN bertentangan dengan **peraturan perundang-undangan.**
3. KTUN melangar aspek substansi/**cacat substansi**.
4. KTUN bertentangan dengan **asas-asas umum pemerintahan yang baik**.



integrity@integritylawfirms.com

PEMBUKTIAN

Pasal 100 UU No.5 Tahun 1986

1. **Bukti Tertulis.**
   - ❑ Surat adanya hubungan sebab akibat antara KTUN dan kerugian kepentingan penggugat.
   - ❑ Tanggal penerimaan KTUN dan tanggal pengajuan upaya administratif.
2. **Saksi** yang benar-benar mengetahui peristiwa administratif (misalnya proses permohonan izin, pemeriksaan lapangan, rapat penetapan).
3. **Ahli.**
4. **Pengakuan Para Pihak**
5. **Pengetahuan Hakim**



integrity@integritylawfirms.com

TAHAPAN PEMERIKSAAN ACARA PERKARA PTUN

1. Pendaftaran Gugatan;
2. Proses *Dismissal*;
3. Pemeriksaan Persiapan;
4. Pembacaan Gugatan;
5. Jawaban Tergugat;
6. Replik Penggugat;
7. Duplik Tergugat;
8. Pemeriksaan Pokok Perkara;
   - Alat Bukti Tertulis dan/atau Elektronik;
   - Saksi;
   - Ahli.
9. Kesimpulan Para Pihak; dan
10. Putusan.



PUTUSAN PTUN

01 **Membatalkan atau Menyatakan tidak Sah KTUN/TF.**

02 **Mencabut KTUN.**

03 **Menerbitkan KTUN.**

04 **Mencabut dan Menerbitkan KTUN.**

05 **Melakukan, Tidak Melakukan, Menghentikan TF.**

06 **Ganti Rugi.**



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy









https://integritylawfirms.com/indonesia/category/programs/integrity-scholarship-programs/



https://www.integritylawfirms.com

integrity@integritylawfirms.com

We are the INTEGRITY





Jakarta, Indonesia

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825.
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, **Jakarta** 10220
Phone : +62 21 2555 8836

Melbourne and Sydney, Australia

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Phone : 1300 912 889

Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Sydney, NSW 2000
Phone : 1300 912 889

www.integritylawfirms.com